KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan salah satu mandat dari Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Rencana Kerja ini memuat Analisa pencapaian kinerja tahun lalu, tahun berjalan, tujuan dan sasaran, kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2017.

Disadari bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Luwu Utara ini belum maksimal dan masih jauh dari harapan kita semua, namun kami optimis bahwa melalui Renja ini dapat dijadikan sebagai indikator dan strategi untuk melaksanakan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Kab. Luwu Utara untuk Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan berdasarkan arah kebijakan dan skala prioritas yang ditetapkan.

Masamba, 2016

Kepala BKDD Kab. Luwu Utara

Drs. F. P. PATUANG, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 196109291989031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaa Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB 4. PENUTUP

- 4.1. Tinjauan Umum
- 4.2. Saran Tindak Lanjut

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini merupakan tahun transisi Perencanaan Pembangunan Daerah karena merupakan akhir dari RPJMD 2010-2015. Akan tetapi untuk mengisi kekosongan acuan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD maka RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Tahun 2010-2015 tetap merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Rencana Kerja (Renja) BKDD Tahun 2017 adalah program dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan dan Satyalencana Karya Satya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri sipil;

22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Lain Kabupaten Luwu Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 - 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara;
30. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).
32. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja BKDD adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tujuan disusunnya Renja BKD adalah: (1) merumuskan rancangan program kegiatan dan anggaran untuk 1 tahun mendatang. (2) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Diklat tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN memuat; latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU memuat; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPd, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN memuat; telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP memuat; catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

REKAPITULASI EVALUASI RENJA SKPD 2016 KABUPATEN LUWU UTARA
DENGAN TARGET KINERJA 20 PERSEN (1 dari 5 tahun RENSTRA)

NO	SKPD	CAPAIAN KINERJA OUTCOME & OUTPUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN						KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
		2015 (%) (100%)	2016 - 2021 (%) (20%)	2016	2016	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	RENDAH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELEBIHI TARGET (%)	TDK TERLAKSANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BKDD	68,96	35,33	Sangat Rendah	Sangat Rendah	11	74	54	3	0	17	
		88,11	37,45	Rendah	Rendah		100%	72,97	4,05	0,00	22,97	Rendah

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perubahan SKPD oleh BKDD 74 kegiatan tahun 2016 menggambarkan bahwa dari 11 Program dan 74 kegiatan, tingkat capaian kinerja renja tahun 2016 yang dievaluasi dalam persen (%) adalah untuk kriteria kinerja program (Out Come) sebesar 35,33% dengan kategori ketepatan perencanaan "SANGAT RENDAH" dan kinerja kegiatan (Out Put) sebesar 37,45% dengan kategori ketepatan perencanaan "SANGAT RENDAH" untuk penilaian pelaksanaan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program pendidikan kedinasan dengan realisasi capaian targetnya Renja sebesar 0,57% dan realisasi capaian target Renstra sebesar 0,57%.
2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturrealisasi capaian target Renja sebesar 7,55% sedangkan realisasi capaian target Renstra telah mencapai 28,99%.
3. Program pembinaan dan pengembangan aparaturrealisasi capaian target Renja sebesar 12,52% dan realisasi capaian target Renstra sebesar 30,16%.

Bobot penilaian kriteria menggunakan penilaian 5 (lima) kategori yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kriteria dari capaian masing-masing kegiatan. Adapun kriteria kategori skala peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi nilai program. Selanjutnya nilai dari setiap program pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap program kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan BKDD berdasarkan indikator kinerja utamasesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi untuk tahun n-2, tahun n-1, tahun n dan tahun n+1 Badan Kepegawaian dan Diklat memiliki 8 Indikator Sasaran terlihat pada lampiran Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator pertama, persentase ASN yang memiliki Serifikasi keahlian dan jabatan, dengan 8,53%, ternyata pada Tahun 2016 persentase ASN yang memiliki Serifikasi keahlian dan jabatan sebesar 0,09%
2. Indikator kedua, persentase ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan target 76,77%, dengan realisasi capaian target 68,24.
3. Indikator ketiga, rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun, target 97,24%, dengan realisasi capaian 98,94%.
4. Indikator keempat, persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin, target 0,17%, ternyata pada tahun 2016 ada dari 10 target yang ditetapkan ternyata hanya ada 8 ASN (0,14%) yang mendapatkan hukuman disiplin
5. Indikator kelima, rasio ASN terhadap jumlah penduduk, dengan target 1,62% dan realisasi target 1,62% hal ini disebabkan tidak adanya penerimaan CPNS pada tahun 2016 baik dari jalur umum maupun Kategori II.

6. Indikator keenam, persentase data ASN yang telah dimuktahirkan dengan sistem yang tersedia, dengan target 34,12% dan realisasi sebesar 25,59%.
7. Indikator ketujuh, status laporan kinerja kategori baik dengan target predikat B dan realisasi predikat B
8. Indikator kedelapan, laporan keuangan tepat waktu dengan target Tepat dan realisasi target Tepat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKDD

Melihat permasalahan dan isu yang berkembang terhadap pelayanan di BKDD Kab. Luwu Utara, sehingga perlu menetapkan dan menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil ditengarai masih tidak kompeten (*incompetence*) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik;
2. PNS tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi);
3. PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (*mismatch*);
4. PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (*under employment*);
5. kinerja rendah (*under performance*).
6. pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan Pola Karier PNS yang jelas;
7. Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja), serta belum diterapkannya sistem reward and punishment;
8. belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata;
9. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai hal ini karena tidak sinkronnya SIMPEG BKDD dengan SIMPEG di SKPD Kab. Luwu Utara
10. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, sebagaimana terlihat pada lampiran dalam Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan para pemangku kepentingan hasil Musrembang dari SKPD yang terkait langsung dengan pelayanan yang ditujukan kepada BKDD terdapat 2 (dua) kegiatan yang diusulkan yaitu Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Daerah dan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier bagi PNS, dengan rincian dapat dilihat pada lampiran tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Renja BKDD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKDD periode 2016-2021. Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKDD Kabupaten Luwu Utara adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat yang juga merupakan kunci kesuksesan Program Nawacita yang terletak pada birokrasi yaitu Sumber Daya Aparatur Pemerintahan.

Untuk itu ditampilkan Program Nawacita, Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat sebagai berikut:

I. Program Nawacita

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

II. Kementerian PAN-RB

Visi: “Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang Baik”.

Misi :

- 1). Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2). Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;
- 3). Meningkatkan koordinasi pengawasan;
- 4). Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;
- 5). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;
- 6). Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.

III. BKN Pusat

VISI: “*Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera*”. MISI:

- 1). Mengembangkan Sistem Manajemen SDM PNS
- 2). Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- 3). Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian
- 4). Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
- 5). Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian
- 6). Menyelenggarakan manajemen internal BKN.

Dari visi dan misi dua kementerian tersebut BKDD juga memperhatikan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu “**Luwu Utara Yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal pada 2021**”.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara, maka misi yang sesuai dengan misi bupati adalah Misi Kesatu yang berbunyi :

“Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya”

dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan penerapan sistem dan proses tatakelola yang konsisten dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik dengan sasaran :

(1) Terimplementasikannya prinsip – prinsip akuntabilitas,transparansi, efektif-efisien, dan patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan 2 :Meningkatkan pengamalan agama dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan dengan sasaran:

(1) Terimplementasikannya nilai – nilai dan prinsip-prinsip kehidupan yang religius dalam masyarakat.

Tujuan 3 :Meningkatkan partisipasi dan peran lembaga / komunitas adat dalam pembangunan dengan sasaran:

(1) Terpenuhinya rekognisi dan keberdayaan lembaga / komunitas adat dalam berperanserta dalam penyelenggaraan pembangunan.

Adapun keterkaitan antara misi, kebijakan daerah dengan kebijakan Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Luwu Utara yaitu :

Misi 1 :Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.

Tujuan : Meningkatkan penerapan sisten dan proses tatakelola yang konsisten dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik

Sasaran : Terimplementasikannya prinsip – prinsip akuntabilitas,transparansi, efektif-efisien, dan patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi : Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam pengamalan nilai-nilai religius, pemenuhan sarana/prasarana ibadah dan kerukunan antar umat beragama

Sasaran dan Strategis BKDD dalam menunjang visi dan misi kesatu kepala daerah :

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur berbasis kompetensi.
2. Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen.
3. Meningkatnya Disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis TIK.

Strategi :

1. Meningkatkan profesionalisme pegawai dengan dana yang memadai;
2. Pegawai yang professional dengan renumerasi dan tingkat kesejahteraan yang adil, layak dan kompetitif;
3. Tingkatkan kinerja aparatur yang bebas KKN
4. Penerapan Simpeg dengan memanfaatkan TI untuk tingkatkan kinerja aparatur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan Kapasitas ASN dan Kapasitas Manajemen ASN untuk mendorong Profesionalisme, Kompetensi dan Kinerja Sumberdaya Aparatur.
- 2) Mewujudkan Tata kelola ASN dan menguatnya kapasitas kelembagaan Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Kompetensi ASN
- 2) Terwujudnya Tata kelola ASN dan menguatnya kapasitas kelembagaan Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis TIK.
- 4) Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif

Dapat digambarkan dalam lampiran tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program

Sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat dalam rangka penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan aparatur, ditetapkan rencana program prioritas Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Kedinasan
2. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
4. Program pelayanan administrasi perkantoran
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6. Program peningkatan disiplin aparatur
7. Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS
8. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10. Program peningkatan pelayanan kedinasan

11. Program perencanaan pembangunan daerah

Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan untuk satu tahun kedepan (2017) merupakan kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari Program Lima Tahunan (2016 - 2021) untuk dipedomani dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara.

Uraian kegiatan indikatif tahun 2017, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program pendidikan kedinasan

- 1) Pendidikan penjenjangan struktural
- 2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
- 3) Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

2. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

- 1) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

- 1) Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS
- 2) Seleksi penerimaan CPNS Daerah
- 3) Penempatan PNS
- 4) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
- 5) Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
- 6) Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
- 7) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
- 8) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
- 9) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

4. Program pelayanan administrasi perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 9) Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Asset

5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 1) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2) Pengadaan mebeleur
- 3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- 4) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional
- 5) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

6. Program peningkatan disiplin aparatur

- 1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

7. Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS

- 1) Pemindahan tugas PNS

8. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

10. Program peningkatan pelayanan kedinasan

- 1) Kunjungan kerja Bersama Bupati Wakil Bupati/DPRD Pimpinan Tinggi Daerah lainnya

11. Program perencanaan pembangunan daerah

- 1) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Program dan kegiatan tahun 2017 Badan Kepegawaian Dan Diklat sebagaimana terlampir dalam tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2017.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Rencana Kerja (RENJA) BKDD Kab. Luwu Utara ini selain menjadi bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Kab. Luwu Utara. juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kepegawaian Pemerintah Kab. Luwu Utara. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BKDD Kab. Luwu Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

4.2. Saran Tindak Lanjut

Akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama yang terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat(BKDD) dan melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas saran serta bantuan yang diberikan.

Masamba, 2016

Kepala BKDD Kab. Luwu Utara

Drs. F.P. PATUANG, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 196109291989031008